

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses struktural dalam penyeimbangan ekonomi yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti peningkatan taraf hidup atau penyempurnaan mutu kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada hakekatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual, pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan dalam pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006:208). Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya, Peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Kesejahteraan masyarakat meliputi semua bentuk intervensi sosial dengan tujuan utama pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat yaitu terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup. Khususnya kebutuhan yang bersifat mendasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (*United Nation Development Programme, UNDP, 1993:148*).

Menurut Human Development Report 2007-2008, IPM Indonesia naik sebesar 0,728 pada tahun 2007 dan berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh *United Nation Development Programme, UNDP*. Secara umum Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2007-2011 selalu mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Situasi perekonomian negara ini yang setiap tahunnya mengalami perubahan semakin membaik secara langsung berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, hal itupun terjadi di

provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dan bisa dilihat di Tabel 1.

dibawah ini mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera.

Tabel 1. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2007-2011 di Provinsi – Provinsi Pulau Sumatera

Nama Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77
Sumatera Utara	72,78	73,29	73,8	74,19	74,65
Sumatera Barat	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28
Riau	74,63	75,09	75,6	76,07	76,53
Jambi	71,46	71,99	72,45	72,74	73,30
Kepulauan Riau	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78
Bangka Belitung	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37
Bengkulu	71,57	72,14	72,55	72,92	73,40
Sumatera Selatan	71,4	72,05	72,61	72,95	73,42
Lampung	69,78	70,3	70,93	71,42	72,45
Indonesia	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77

Sumber: BPS Pusat Indonesia, tahun 2013

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Pulau

Sumatera setiap tahunnya dari tahun 2007-2011 selalu mengalami peningkatan.

Dilihat dari data diatas bahwa Provinsi Riau mempunyai nilai Indeks

Pembangunan Manusia yang paling tinggi diantara provinsi-provinsi lainnya di

Pulau Sumatera. Secara umum nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia yang

terdapat di sepuluh provinsi Pulau Sumatera angkanya diatas nilai IPM Indonesia

yang dihitung secara keseluruhan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini

pantas bila provinsi-provinsi Pulau Sumatera menjadi barometer bagi laju

pengembangan pembangunan dan perekonomian di Indonesia setelah provinsi-

provinsi yang terdapat di Pulau Jawa.

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang terletak di ujung selatan Pulau

Sumatera dan paling dekat dari Pulau Jawa yang mungkin bisa menjadi poros atau

gerbang pembuka perekonomian se-Sumatera. Dengan wilayah yang sangat

strategis Provinsi Lampung seharusnya menjadi contoh berkembangnya Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera. Akan tetapi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung sampai saat ini masih tergolong terendah se-Sumatera bahkan dibawah rata-rata angka IPM di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2007-2012 di tabel 1. Hal tersebut mencerminkan ada yang kurang baik dari perkembangan pembangunan manusia, kemajuan perekonomian dan sistem pemerintahan yang menyebabkan tidak berkembangnya Provinsi Lampung dibandingkan dengan provinsi lainya di Pulau Sumatera. Dengan menggunakan dua indikator dari penilaian Indeks Pembangunan Manusia yaitu angka harapan hidup dan angka melek huruf dari tahun 2003- 2012 di Provinsi Lampung kita bisa melihat apakah terdapat masalah dalam rangka untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia tersebut.

Tabel 2. Angka Harapan Hidup dan Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung tahun 2003-2012

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (persen)
2003	66,20	91,60
2004	67,60	93,10
2005	68,00	93,50
2006	68,50	93,50
2007	68,80	93,47
2008	69,00	93,63
2009	69,25	94,37
2010	69,50	94,64
2011	69,75	95,02
2012	70,05	95,65

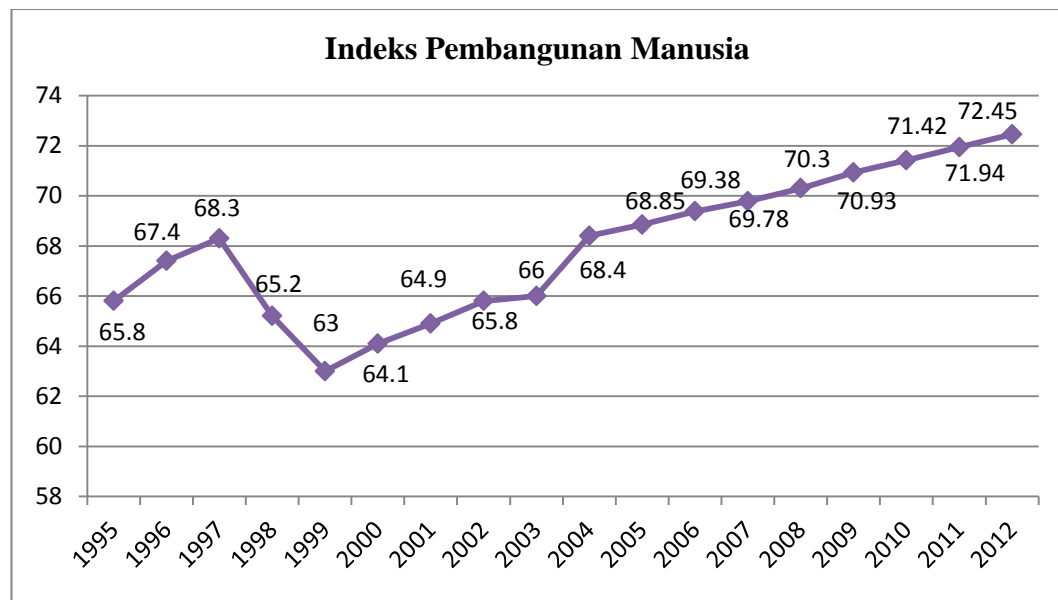
Sumber: BPS Provinsi Lampung, tahun 2013

Berdasarkan hasil tabel 2 diatas bahwa angka harapan hidup dan angka melek huruf di Provinsi Lampung dari tahun 2003-2012 dalam hal ini selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dilihat dari data tersebut bahwa sebenarnya kedua

indikator tersebut menunjukkan hal yang baik untuk peningkatan nilai dari indeks pembangunan di Provinsi Lampung. Hal tersebut bahwa tidak ada masalah yang berarti dalam perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung walaupun dilihat dari angka indeks pembangunan manusia sedikit tertinggal dengan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera lainnya.

Berikut ini disajikan data lebih lengkap tentang laju pertumbuhan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung dari Tahun 1995-2012:



Gambar 1. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 1995-2012 di Provinsi Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung, tahun 2013

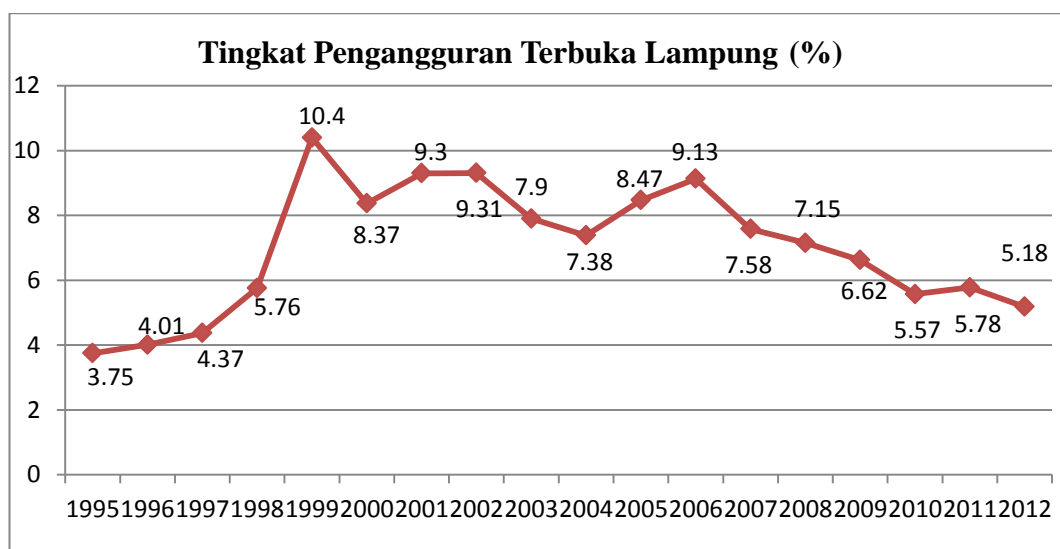
Berdasarkan gambar 1 bisa kita lihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dari tahun 1995-2012 terjadi pergerakan yang fluktuatif, terutama tahun disaat sebelum dan sesudah krisis moneter. Namun pada tahun 1999-2012 tingkat dari Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan tetapi hal ini sangat membantu dalam segi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Pada tahun 2002 IPM Lampung yaitu 65,80 angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung dalam aspek Indeks Pembangunan Manusia masih digolongkan dalam kelompok menengah kebawah. Dalam skala internasional, status Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung angkanya tergolong dalam kelompok menengah ke atas ($66 < \text{IPM} < 80$), sehingga masih diperlukan komitmen dan kerja keras yang kuat dari pemerintah provinsi, dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada kualitas hidup.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah pengangguran, dimana pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Menurut Sadono Sukirno (2004:76), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kepada rendahnya indeks pembangunan manusia karena tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhannya. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam jangka menengah sampai jangka panjang.

Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang

merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Mereka juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan mereka tidak terpenuhi. Bahwa pengangguran juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang. Pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Pengangguran yang rendah merupakan faktor dalam peningkatan pembangunan manusia.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 1995-2012 di Provinsi Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung, tahun 2013 (diolah)

Berdasarkan hasil gambar 2 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 1995-2012 mengalami gejala yang fluktuatif, dimana persentase pertumbuhan tingkat penganggurannya terjadi naik turun. Terutama tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yang sangat signifikan saat dimana pasca krisis moneter antara tahun 1997-1999, bahkan pada tahun 1999 angkanya mencapai 10,4% di Provinsi Lampung dan ini menjadi tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi selama 18 tahun terakhir. Pada

tahun 2002-2006 persentase tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tidaklah bagus, dikarenakan terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak menentu. Pada tahun 2007-2012 mulailah terjadi penurunan terus-menerus dalam persentase pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Jumlah persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007 dengan persentase pertumbuhan 7,58 % dan enam tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 jumlah persentase untuk tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran di Provinsi Lampung mengalami progres yang meningkat dan sangat baik.

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Salah satu tugas pembangunan yang terpenting adalah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pembangunan manusia.

Pembangunan manusia atau kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting, penekanan terhadap meningkatkan mutu sumberdaya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Mutu SDM yang baik disuatu wilayah memiliki peranan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Tingkat pembangunan manusia

yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).



Gambar 3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tahun 1995-2012 di Provinsi Lampung

Sumber : BPS Provinsi Lampung, tahun 2013 (diolah)

Berdasarkan gambar 3 maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dari tahun 1995-2012 mengalami keadaan yang naik turun atau fluktuatif. Pada tahun 1995 laju pertumbuhan ekonomi Lampung yaitu mencapai 10,49 % , tetapi pada tahun 1996-2001 nilainya mengalami penurunan yang sangat signifikan antara 4-3% saja, hingga angkanya terendahnya menyentuh pada 3,4% yaitu pada tahun 2000. Keadaan pertumbuhan ekonomi yang naik turun yang demikian

tersebut terjadi pula dari tahun 2002 hingga tahun 2008, tetapi laju pertumbuhan ekonominya tidak separah periode tahun 1995-2001. Barulah pada tahun 2009-2012 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung mulai membaik dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonominya meningkat yaitu 5,88% , kemudian pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 6,43% , lalu trend positif pada laju pertumbuhan ekonomi ini kembali terjadi di tahun 2012 dengan jumlahnya yaitu 6,48%. Secara langsung dampak pertumbuhan ekonomi yang selalu mengalami trend yang positif dapat membantu peningkatan dari Indeks Pembangunan Ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah akan menciptakan kemandirian fiskal bagi daerah kabupaten/kota. Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri sehingga daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja publik pada bidang kesehatan dan pendidikan, pemerataan tingkat pendapatan serta penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, yaitu: (1) Peran Stabilisasi, pemerintah lebih berperan sebagai

stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.

Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Dengan adanya Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam

pembangunan. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan teori Indeks Pembangunan Manusia, yang menekankan sangat pentingnya peran pemerintah didalam kedua sektor tersebut. Dikarenakan beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri, melalui peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan di Provinsi Lampung. Tentunya untuk merealisasikan kebijakan tersebut pemerintah telah mengalokasikan dalam anggaran belanjanya yang mengharuskan agar mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk sektor kesehatan dari total APBN maupun APBD sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Berikut ini adalah data tentang jumlah realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan tahun 1995-2012 di Provinsi Lampung

Tahun	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
1995	6.246.500.998	1.232.058.400
1996	6.231.810.027	2.289.863.975
1997	4.022.736.780	1.177.469.200
1998	3.449.958.125	1.320.216.420
1999	6.561.035.740	6.007.565.496
2000	9.398.000.000	15.199.563.000
2001	11.194.000.000	17.076.000.000
2002	26.150.000.000	32.899.000.000
2003	28.869.000.000	34.106.000.000
2004	51.566.000.000	67.588.371.807
2005	33.004.000.000	38.904.696.140
2006	67.622.000.000	87.698.599.771
2007	106.000.000.000	152.457.212.232
2008	119.000.000.000	173.993.645.560
2009	180.000.000.000	268.196.397.636
2010	189.433.000.000	249.423.340.347
2011	202.000.000.000	273.932.433.644
2012	222.578.521.571	281.023.203.847

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan bagian Keuangan Provinsi

Lampung (diolah)

Berdasarkan tabel 3 dapat dikatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Lampung pada tahun 1995-2012 cenderung mengalami peningkatan, terkecuali mengalami penurunan disaat masa krisis moneter antara tahun 1997-1998. Akan tetapi penurunan tersebut hanya terjadi dua tahun itu saja, dan pada tahun – tahun seterusnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan selalu mengalami peningkatan dari segi pendanaan dan pelayanannya. Dengan demikian ini sangat berdampak positif bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti, tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan

Ekonomi serta Pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 1995-2012”.

B. Rumusan Masalah

Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun serta menurunnya tingkat pengangguran, laju Indeks Pembangunan Manusia sudah seharusnya juga dapat meningkat secara signifikan. Sementara itu dibantu juga dengan semakin membaiknya fasilitas serta pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan yang menggunakan anggaran pengeluaran pemerintah dimana dari tahun ke tahun semakin meningkat maka akan berdampak pada pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam makalah ini, maka permasalahan yang akan dipelajari adalah:

1. Bagaimana pengaruh antara tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012 ?
2. Bagaimana pengaruh antara tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012 ?

3. Bagaimana pengaruh antara tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012 ?
4. Bagaimana pengaruh antara tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.
- b. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.
- c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.
- d. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberitahukan pengaruh tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.

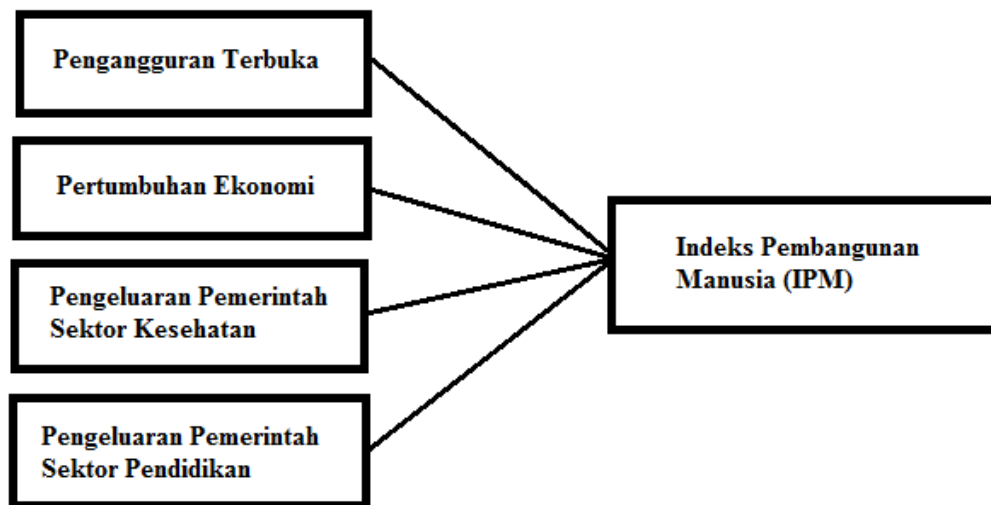
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberitahukan pengaruh tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberitahukan pengaruh tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberitahukan pengaruh tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.

D. Kerangka Teoritis

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikenal dengan *Human Development Index*. Dimana indikator ini digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia, kemudian perlu ditambahkan bahwa nilai IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi, maka perlu dilakukan penelitian mengenai terkait faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh positif. Sedangkan untuk tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itulah dalam menguji pengaruh tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM). Hal ini dapat dilihat dari kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar. Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Diduga tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.

H2 : Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.

- H3 : Diduga tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.
- H4 : Diduga tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 1995-2012.